

EVALUASI PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) DI KECAMATAN DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR

Arini Dwi Septyani*

Universitas Krisnadwipayana Jakarta, Indonesia

*Email: dwiseptyania@gmail.com**

Riwayat Artikel

Diterima: 4 November 2025

Disetujui: 4 Desember 2025

Diterbitkan: 18 Desember 2025

Abstract

The Jakarta Smart Card (Kartu Jakarta Pintar/KJP) is an educational assistance program initiated by the Provincial Government of DKI Jakarta to support the continuity of schooling for students from low-income families. This study aims to evaluate students' perceptions of the implementation of the KJP Program in Duren Sawit District, East Jakarta, and to identify the main obstacles faced as well as improvement suggestions from beneficiaries. A quantitative descriptive approach was employed, involving 57 respondents who are KJP recipient students at the junior and senior secondary levels. Data were collected using a 5-point Likert scale questionnaire consisting of 20 statement items, one categorical question on implementation constraints, and one open-ended question for suggestions. The data were analyzed using descriptive statistics, frequency and percentage distributions, and simple thematic analysis. The findings indicate that students' perceptions of the KJP Program are in the "very high" category, with an overall mean score of 4.528, suggesting that the program is perceived as highly beneficial in meeting educational needs. Nevertheless, several issues remain, particularly delays in fund disbursement, limited information, and restricted flexibility in the use of funds. Open-ended responses highlight the need to increase the amount of assistance, improve the timeliness of disbursement, expand partner merchants, and strengthen targeting accuracy and monitoring of fund utilization. These results suggest that while the KJP Program is generally well-received by beneficiaries, improvements in technical implementation and governance are still required to maximize its contribution to equitable access to education.

Keywords: *Jakarta Smart Card, program evaluation, students' perception, education assistance, Duren Sawit.*

Abstrak

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan bantuan pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditujukan untuk mendukung keberlanjutan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi persepsi siswa terhadap pelaksanaan program KJP di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan saran perbaikan dari penerima manfaat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, melibatkan 57 responden yang merupakan siswa penerima KJP di tingkat SMP dan SMA. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert 1-5 (20 item pernyataan), pertanyaan kategori mengenai kendala, dan satu pertanyaan terbuka untuk saran, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif, frekuensi-persentase, serta analisis tematik sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap Program KJP berada pada kategori sangat tinggi dengan nilai mean variabel 4,734, yang mengindikasikan bahwa program dinilai sangat tinggi membantu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Namun, masih ditemukan beberapa kendala, terutama

keterlambatan pencairan dana, kurangnya informasi, serta keterbatasan fleksibilitas penggunaan dana. Saran terbuka dari responden menekankan perlunya peningkatan besaran dana, perbaikan ketepatan waktu pencairan, perluasan merchant/toko mitra, penguatan ketepatan sasaran, dan pengawasan penggunaan dana. Temuan ini menunjukkan bahwa program KJP telah berjalan baik dari perspektif penerima manfaat, tetapi tetap memerlukan penyempurnaan pada aspek teknis dan tata kelola agar dampaknya terhadap pemerataan akses pendidikan semakin optimal.

Kata kunci: Bantuan Pendidikan, Evaluasi Program, Kartu Jakarta Pintar, Kecamatan Duren Sawit, Persepsi Siswa.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sebagaimana diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948, yang menekankan bahwa setiap individu berhak atas akses pendidikan tanpa diskriminasi. Dalam konteks pembangunan manusia, pendidikan bukan sekadar investasi ekonomi, melainkan sarana untuk membebaskan potensi manusia, mempromosikan kesetaraan sosial, dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berempati. Di Indonesia, tantangan akses pendidikan seringkali diperburuk oleh kesenjangan ekonomi, di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu menghadapi hambatan biaya yang menghalangi mereka untuk mencapai potensi sepenuhnya. Hal ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan, karena pendidikan yang terbatas dapat memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan antar generasi (UNESCO, 2020).

Sebagai respons terhadap tantangan ini, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) melalui Dinas Pendidikan meluncurkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) pada tahun 2012. Program ini dirancang sebagai inisiatif kebijakan publik yang humanis, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak usia sekolah di Jakarta terlepas dari latar belakang ekonomi dapat mengakses pendidikan yang layak dan bermutu. KJP menyediakan bantuan dana untuk biaya pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga menengah, dengan fokus pada pemberdayaan manusia melalui pendidikan inklusif. Namun, dalam praktiknya, implementasi program ini sering kali tidak mencapai esensi humanisnya, di mana hambatan birokrasi dan ketidaktepatan sasaran dapat merampas hak pendidikan anak-anak yang paling rentan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2022).

Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa program bantuan pendidikan serupa di berbagai negara, seperti Bolsa Família di Brasil atau Conditional Cash Transfer di Meksiko, berhasil meningkatkan akses pendidikan dengan pendekatan yang berpusat pada manusia, tetapi tantangan implementasi seperti keterlambatan pencairan dana, ketidaktepatan sasaran, dan kurangnya sosialisasi sering kali mengurangi efektivitasnya (Fiszbein et al., 2009). Di Jakarta, laporan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta (2023) mengungkapkan bahwa meskipun KJP telah menjangkau ribuan siswa, persoalan lapangan seperti inefisiensi administrasi dan kurangnya partisipasi masyarakat masih menghambat pencapaian tujuan program. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis: Apakah KJP benar-benar memenuhi janji humanisnya untuk membebaskan anak-anak dari belenggu kemiskinan melalui pendidikan, atau apakah program ini masih terjebak dalam kerangka birokrasi yang kurang empati?

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program KJP di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan pendekatan humanisme yang menekankan perspektif manusia sebagai subjek utama kebijakan publik. Secara spesifik, penelitian ini mengkaji: (1) tingkat kepuasan penerima manfaat dari program KJP (2) kendala-kendala yang muncul dalam proses implementasi, dan (3) dampak program terhadap akses dan kualitas pendidikan bagi siswa penerima manfaat, dengan fokus pada aspek kesejahteraan manusia seperti

motivasi belajar, partisipasi keluarga, dan pengurangan stigma sosial. Melalui metode kuantitatif, penelitian ini mengintegrasikan teori implementasi kebijakan publik (Van Meter dan Van Horn, 1975) dengan perspektif humanis yang menyoroti empati, partisipasi, dan keadilan sosial.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya untuk memperkuat administrasi publik yang lebih manusiawi. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan efektivitas KJP, sehingga program ini tidak hanya menjadi instrumen birokrasi, tetapi juga alat transformasi sosial yang memprioritaskan martabat manusia. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada literatur administrasi publik di Indonesia, khususnya dalam konteks kebijakan pendidikan inklusif yang berbasis hak asasi manusia.

B. KAJIAN PUSTAKA

Dunn (2003) menjelaskan bahwa evaluasi program kebijakan publik dapat dilakukan dengan menilai beberapa aspek utama, antara lain efektivitas, manfaat, dan kendala pelaksanaan kebijakan. Efektivitas merujuk pada sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manfaat kebijakan berkaitan dengan dampak positif yang dirasakan oleh kelompok sasaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, kendala pelaksanaan mencakup berbagai hambatan teknis maupun non teknis yang muncul selama kebijakan dijalankan.

Evaluasi kebijakan publik juga dapat dilakukan melalui pendekatan persepsi penerima manfaat. Persepsi penerima manfaat penting untuk dikaji karena kelompok inilah yang merasakan secara langsung dampak dari kebijakan yang dilaksanakan. Persepsi yang positif menunjukkan bahwa kebijakan telah memberikan manfaat sesuai kebutuhan, sedangkan persepsi negatif dapat menjadi indikasi adanya permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam penelitian ini, evaluasi Program KJP dilakukan dengan menilai persepsi dan pengetahuan siswa sebagai penerima manfaat terhadap pelaksanaan program, manfaat yang dirasakan, serta kendala yang dialami. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Dunn (2003) bahwa evaluasi kebijakan harus berorientasi pada hasil dan dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP)

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan kebijakan bantuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat menyelesaikan pendidikan secara berkelanjutan. Program ini memberikan bantuan dana pendidikan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, seperti perlengkapan belajar, seragam, dan kebutuhan pendukung lainnya.

Tujuan utama Program KJP adalah untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, mengurangi angka putus sekolah, serta meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu. Sasaran program ini adalah siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut hukum, pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Kartu Jakarta Pintar. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam penetapan penerima manfaat, mekanisme penyaluran dana, serta pengawasan penggunaan bantuan pendidikan.

Kerangka Evaluasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan kerangka evaluasi kebijakan publik menurut Dunn (2003) dengan fokus pada evaluasi hasil (outcome evaluation). Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) memberikan manfaat kepada penerima serta mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaannya.

Kerangka evaluasi dalam penelitian ini meliputi:

- Manfaat Program, yang diukur melalui persepsi siswa terhadap kegunaan KJP dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.
- Efektivitas Program, yang dilihat dari tingkat kepuasan dan penilaian siswa terhadap pelaksanaan KJP.
- Kendala Pelaksanaan, yang diidentifikasi melalui hasil monitoring berupa keluhan dan hambatan yang dialami siswa selama menerima bantuan KJP.

Dengan menggunakan kerangka evaluasi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai hasil monitoring dan evaluasi Program KJP di Kecamatan Duren Sawit serta menjadi dasar dalam

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada pengumpulan data berupa angka yang kemudian dianalisis secara statistik. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang objektif mengenai efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) berdasarkan data empiris dari para penerima manfaat. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang dipilih sesuai rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur untuk dijadikan lokasi penelitian. Pelaksanaan penelitian dilakukan dalam rentang waktu November 2025-Desember 2025, mencakup tahap persiapan instrumen, pengambilan data, hingga proses analisis awal.

Dalam penelitian ini, jumlah populasi siswa penerima KJP di wilayah Duren Sawit tidak diketahui secara pasti. Pihak dinas terkait memberikan privasi data siswa penerima KJP. Oleh karena itu, penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik non-probability sampling, khususnya metode purposive sampling, dengan mempertimbangkan kriteria siswa yang secara aktif menerima manfaat KJP dan bersekolah di jenjang SMP maupun SMA. Total sampel yang berhasil dikumpulkan berjumlah 57 responden, terdiri dari siswa penerima KJP dari beberapa sekolah di wilayah tersebut. Pemilihan sampel ini diarahkan untuk memberikan gambaran representatif mengenai persepsi dan pengalaman siswa penerima bantuan, meskipun tidak berdasarkan perhitungan populasi secara probabilistik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner Google Form kepada siswa sebagai instrumen utama. Kuesioner ini terdiri dari 20 butir pernyataan skala Likert (1-5). 1 Pertanyaan tambahan berbentuk kategori (item 21) untuk mengetahui kendala KJP. Dan 1 Pertanyaan terbuka untuk meminta saran responden.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner yang disusun berdasarkan indikator-indikator pada variabel X (Persepsi Siswa terhadap Program Kartu Jakarta Pintar (KJP)). Bagian pertama kuesioner terdiri atas 20 item pernyataan menggunakan skala Likert 1-5, dimana seluruh item bersifat *favorable*. Dengan demikian, skor diberikan sesuai tingkat persetujuan responden, mulai dari “sangat tidak setuju” hingga “sangat setuju”. Bagian kedua berisi 1 item pertanyaan kategori (item 21) yang memuat pilihan mengenai kendala yang dialami responden, seperti keterlambatan pencairan atau kurangnya informasi. Item ini tidak dianalisis menggunakan nilai rata-rata, melainkan melalui frekuensi dan persentase. Selain itu, kuesioner juga menyertakan pertanyaan terbuka yang memberikan kesempatan bagi responden untuk menyampaikan saran terkait pelaksanaan program KJP. Jawaban pada bagian ini dianalisis secara kualitatif sederhana melalui proses pengelompokan tema (*coding*).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan terhadap tiga jenis data. Pertama, data kuantitatif dari item 1-20 dianalisis menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan menghitung nilai rata-rata (mean) setiap item dan mean keseluruhan variabel untuk menggambarkan persepsi umum responden. Kedua, data kategori pada item 21 dianalisis dengan menghitung frekuensi dan persentase dari setiap pilihan kendala untuk mengetahui

masalah yang paling banyak dialami responden. Ketiga, data kualitatif berupa saran terbuka dianalisis melalui teknik coding, yaitu mengelompokkan jawaban ke dalam tema-tema tertentu yang relevan. Hasil pengelompokan kemudian dijelaskan secara deskriptif untuk memberikan gambaran tambahan mengenai pandangan responden terhadap program KJP.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 57 responden yang merupakan 27 siswa SMP Negeri 6 Jakarta, dan 30 siswa SMA Negeri 59 Jakarta yang merupakan siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Kecamatan Duren Sawit. Karakteristik responden (Usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan) dapat ditampilkan pada diagram berikut.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah (orang)	Persentase (%)
13 tahun	...	...
14 tahun	...	...
15 tahun	...	35,6
16 tahun	...	...
17 tahun	...	11,9
18 tahun	...	40,7
Total	57	100%

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 1. responden penelitian didominasi oleh siswa berusia 18 tahun sebesar 40,7%, diikuti oleh usia 15 tahun sebesar 35,6%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada jenjang pendidikan menengah atas.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Laki-laki	25	44,1 %
Perempuan	32	55,9 %
Total	57	100 %

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 2, responden perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, yaitu sebesar 55,9% sedangkan responden laki-laki sebesar 44,1%.

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
SMP (Kelas 7-9)	27	45,8 %
SMA (Kelas 10-12)	30	54,2 %
Total	57	100 %

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 3. mayoritas responden merupakan siswa SMA sebesar 54,2%, sedangkan siswa SMP sebesar 45,8%

Hasil Monitoring Persepsi dan Pengetahuan Siswa terhadap Program (Kartu Jakarta Pintar) KJP

Sub-bab ini menyajikan hasil monitoring terhadap pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Kecamatan Duren Sawit berdasarkan persepsi siswa sebagai penerima manfaat. Monitoring dilakukan untuk menggambarkan kondisi aktual implementasi program di lapangan, khususnya terkait manfaat dan pelaksanaan program sebagaimana dirasakan langsung oleh penerima bantuan. Persepsi penerima manfaat digunakan sebagai indikator monitoring karena mencerminkan pengalaman nyata siswa dalam menerima dan memanfaatkan bantuan KJP selama proses pelaksanaan program.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Persepsi & Pengetahuan Siswa (Item 1-20)

Berikut adalah hasil perhitungan *mean* per variabel (skor Likert 1-5) :

Tabel 4. Hasil Analisis Deskriptif Persepsi & Pengetahuan Siswa (Item 1-20)

No	Variabel / indikator	Jumlah Item	Mean variable
1	Variabel 1(item 1-2)	2	4,552631579
2	Variabel 2 (item 3,13,14)	3	4,596491228
3	Variabel 3 (item 4,5,10)	3	4,362573099
4	Variabel 4 (item 6)	1	4,754385965
5	Variabel 5 (item 7)	1	4,526315789
6	Variabel 6 (item 8)	1	4,578947368
7	Variabel 7 (item 9)	1	4,368421053
8	Variabel 8 (item 11)	1	4,561403509
9	Variabel 9 (item 12)	1	4,473684211
10	Variabel 10 (item 15,16)	2	4,640350877
11	Variabel 11 (item 17,18,19)	3	4,467836257
12	Variabel 12 (item 20)	1	4,631578947
Mean Variabel (X)			4,54288499

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap 20 item pernyataan persepsi dan pengetahuan siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), diperoleh nilai mean variabel sebesar 4,542 yang berada pada kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum siswa memiliki persepsi dan pengetahuan yang sangat positif terhadap pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Kecamatan Duren Sawit.

Nilai mean yang tinggi ini mengindikasikan bahwa program KJP dinilai mampu membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan pendidikan serta mendukung keberlanjutan sekolah bagi penerima manfaat.

Interpretasi Skor Persepsi Siswa

Interpretasi skor menggunakan kategori skala Likert :

Tabel 5. Interpretasi Skor Persepsi Siswa

Rentang Mean	Interpretasi
1,00 – 1,79	Sangat rendah
1,80 – 2,59	Rendah
2,60 – 3,39	Sedang
3,40 – 4,19	Tinggi
4,20 – 5,00	Sangat Tinggi

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Interpretasi skor persepsi dan pengetahuan siswa dilakukan menggunakan kategori skala Likert dengan rentang nilai 1,00 – 5,00. Berdasarkan hasil interpretasi, nilai mean variabel sebesar 4,542 berada pada rentang 4,20 – 5,00 yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi dan pengetahuan siswa terhadap Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) berada pada kategori sangat baik.

Evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) berdasarkan Kerangka Evaluasi Kebijakan Publik Dunn

Sub Bab ini menyajikan hasil evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Kecamatan Duren Sawit berdasarkan hasil monitoring persepsi dan pengetahuan siswa sebagai penerima manfaat. Evaluasi dilakukan untuk menilai manfaat program, efektivitas pelaksanaan, serta kendala yang dihadapi selama implementasi program, sebagaimana dikemukakan dalam kerangka evaluasi kebijakan publik menurut Dunn.

Evaluasi Manfaat Program Kartu Jakarta Pintar (KJP)

Berdasarkan hasil monitoring persepsi dan pengetahuan siswa yang diukur melalui item pernyataan skala Likert (item 1-20). Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dinilai memberikan manfaat yang sangat tinggi bagi penerima manfaat. Hal ini tercermin dari nilai mean variabel persepsi dan pengetahuan siswa yang berada pada kategori sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa bantuan KJP dirasakan membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.

Manfaat utama yang dirasakan siswa meliputi pemenuhan kebutuhan perlengkapan sekolah, dukungan terhadap biaya pendidikan, serta kemudahan dalam menunjang keberlanjutan sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa Program KJP telah menjalankan fungsinya sebagai instrumen kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Dengan demikian, dari aspek manfaat, Program KJP dapat dinilai telah memberikan dampak positif bagi kelompok sasaran.

Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Program KJP

Selain manfaat, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KJP dinilai efektif oleh penerima manfaat. Tingginya tingkat persepsi siswa terhadap program mengindikasikan bahwa mekanisme penyaluran bantuan, penggunaan dana, serta dukungan program secara umum telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung keberlangsungan pendidikan siswa.

Namun, meskipun secara umum pelaksanaan program dinilai efektif, hasil monitoring juga menunjukkan adanya beberapa aspek teknis yang masih memerlukan perbaikan. Aspek-aspek tersebut terutama berkaitan dengan konsistensi pelaksanaan di lapangan, kejelasan prosedur, serta ketepatan waktu penyaluran bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas Program KJP masih dapat ditingkatkan agar pelaksanaannya semakin optimal dan merata bagi seluruh penerima manfaat.

Evaluasi Kendala Pelaksanaan Program KJP (Item 21)

Evaluasi kendala pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dilakukan berdasarkan hasil analisis item 21 yang merupakan pertanyaan kategori mengenai kendala yang dialami oleh siswa penerima bantuan. Hasil analisis kendala disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.6.

Tabel 6 Kendala Pelaksanaan Program KJP

Jenis Kendala	Frekuensi	Persentase
Keterlambatan Pencairan Dana	(28)	49%
Kurang informasi	(14)	25%
Sulit membeli barang sesuai ketentuan	(3)	5%
Tidak ada kendala	(9)	16%
Dana tidak mencukupi	(2)	4%
Tidak bisa mencairkan melampaui batas	(1)	2%
Sesekali dana tidak keluar	(1)	2%

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil analisis, kendala utama yang paling banyak dialami oleh penerima manfaat adalah keterlambatan pencairan dana, yang dialami oleh hampir setengah dari jumlah responden. Selain itu, kurangnya informasi terkait pelaksanaan program juga menjadi kendala yang cukup signifikan bagi sebagian siswa. Kendala lain yang muncul, seperti keterbatasan fleksibilitas penggunaan dana dan ketidaksesuaian kebutuhan dengan ketentuan pembelanjaan, dialami oleh sebagian kecil responden.

Di sisi lain, terdapat pula responden yang menyatakan tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan Program KJP, yang menunjukkan bahwa pada beberapa kasus program telah berjalan dengan lancar. Meskipun demikian, dominannya kendala teknis pencairan dan informasi menunjukkan bahwa aspek implementasi masih perlu mendapatkan perhatian serius dalam proses evaluasi kebijakan, agar penerima manfaat program dapat dirasakan secara lebih optimal oleh seluruh penerima manfaat.

Analisis Saran Terbuka sebagai Rekomendasi Kebijakan

Sub Bab ini menyajikan hasil analisis terhadap saran terbuka yang diberikan oleh siswa penerima Program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama rekomendasi kebijakan yang mencerminkan kebutuhan dan harapan penerima manfaat sebagai bagian dari proses tindak lanjut monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hasil pengelompokan (coding) terhadap jawaban responden, diperoleh tiga tema utama rekomendasi kebijakan, yaitu :

- Penyesuaian dan peningkatan besaran dana bantuan
- Perbaikan mekanisme dan ketepatan waktu pencairan dana
- Peningkatan ketepatan sasaran dan pengawasan pelaksanaan program

Rekomendasi Penyesuaian Besaran Dana Bantuan

Sebagian responden menyampaikan bahwa dana KJP yang diterima masih belum sepenuhnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, terutama bagi siswa pada jenjang pendidikan menengah atas. Oleh karena itu, disarankan agar besaran bantuan KJP

disesuaikan dengan jenjang pendidikan serta mempertimbangkan kenaikan harga perlengkapan sekolah. Penyesuaian ini diharapkan dapat meningkatkan daya guna program dalam mendukung keberlanjutan pendidikan siswa.

Rekomendasi Perbaikan Mekanisme dan Ketepatan Waktu Pencairan

Saran terbuka dari responden juga menekankan perlunya perbaikan pada aspek pencairan dana. Responden mengharapkan agar pencairan dana dilakukan secara lebih tepat waktu dan konsisten. Selain itu, diperlukan transparansi jadwal pencairan serta pemberitahuan yang jelas kepada penerima manfaat apabila terjadi perubahan atau keterlambatan penyaluran dana.

Rekomendasi Peningkatan Ketepatan Sasaran dan Pengawasan

Tema rekomendasi lainnya berkaitan dengan pentingnya ketepatan sasaran penerima KJP dan pengawasan penggunaan dana. Responden menyarankan agar dilakukan verifikasi data penerima secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan diterima oleh siswa yang benar benar membutuhkan. Selain itu, pengawasan penggunaan dana perlu diperkuat melalui keterlibatan sekolah dan orang tua agar bantuan digunakan sesuai dengan tujuan pendidikan.

Secara keseluruhan, saran terbuka dari responden menunjukkan bahwa penerima manfaat tidak hanya menilai program dari hasil yang diterima, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan dan kualitas pelaksanaan Program KJP. Oleh karena itu, saran-saran ini dapat dijadikan dasar dalam perumusan rekomendasi kebijakan berbasis monitoring dan evaluasi.

Pembahasan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program KJP

Hasil monitoring dan evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Kecamatan Duren Sawit menunjukkan bahwa secara umum program ini telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi penerima manfaat. Hal ini tercermin dari tingginya persepsi siswa terhadap pelaksanaan program, yang mengindikasikan bahwa tujuan program dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu telah tercapai.

Temuan ini sejalan dengan pandangan William N Dunn (2003) yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi kelompok sasaran serta mampu menjawab permasalahan yang menjadi dasar perumusan kebijakan. Dalam konteks Program KJP, manfaat program dirasakan secara langsung oleh siswa sebagai penerima bantuan, khususnya dalam mendukung keberlanjutan pendidikan.

Namun, hasil evaluasi juga menunjukkan adanya kendala dalam aspek implementasi, terutama terkait keterlambatan pencairan dana dan kurangnya informasi program. Kendala ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dirancang dengan tujuan yang baik, pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan agar lebih efektif dan merata. Hal ini sejalan dengan konsep evaluasi kebijakan yang menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam pelaksanaan program publik.

Dari perspektif humanisme dalam administrasi publik, Program KJP tidak hanya dipandang sebagai instrumen birokrasi, tetapi juga sebagai kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan manusia. Persepsi positif siswa terhadap program mencerminkan adanya rasa terbantu dan dihargai sebagai subjek kebijakan. Namun, kendala teknis yang masih muncul menunjukkan bahwa aspek empati, keadilan sosial, responsivitas pemerintah perlu terus diperkuat agar kebijakan pendidikan benar-benar bersifat inklusif dan berorientasi pada kebutuhan manusia.

Dengan demikian, hasil monitoring dan evaluasi ini menegaskan bahwa Program KJP telah berada pada jalur yang tepat, tetapi tetap membutuhkan penyempurnaan dalam aspek implementasi agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dapat disimpulkan bahwa secara umum program ini telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa penerima bantuan. Hasil monitoring menunjukkan bahwa persepsi dan pengetahuan siswa terhadap program KJP berada pada kategori sangat tinggi, yang mengindikasikan bahwa program dinilai mampu membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan serta mendukung keberlanjutan sekolah bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu.

Dari aspek evaluasi manfaat, Program KJP telah berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik yang efektif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok sasaran. Bantuan yang diberikan dirasakan langsung oleh siswa dalam menunjang kebutuhan pendidikan sehari-hari. Selain itu, dari aspek efektivitas pelaksanaan, program secara umum dinilai berjalan efektif, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan program.

Hasil evaluasi kendala menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi penerima manfaat adalah keterlambatan pencairan dana dan kurangnya informasi terkait pelaksanaan program. Kendala ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan kebijakan telah tercapai, aspek implementasi masih memerlukan perbaikan agar pelaksanaan Program KJP dapat berjalan lebih optimal, merata, dan responsif terhadap kebutuhan penerima manfaat.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, berikut disampaikan beberapa rekomendasi Monitoring dan Evaluasi yang diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) ke depan.

Disarankan agar pengelola Program KJP meningkatkan ketepatan waktu pencairan dana dengan menetapkan jadwal pencairan yang lebih pasti dan transparan. Selain itu, diperlukan mekanisme pemberitahuan yang jelas kepada penerima manfaat dan pihak sekolah apabila terjadi perubahan atau keterlambatan pencairan dana, sehingga penerima dapat melakukan perencanaan penggunaan dana dengan lebih baik.

Untuk mengatasi kendala kurangnya informasi, disarankan agar pemerintah daerah dan pengelola program memperkuat sosialisasi Program KJP melalui berbagai saluran komunikasi seperti sekolah, media digital, dan platform resmi. Penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penerima manfaat terhadap mekanisme dan ketentuan penggunaan bantuan.

Berdasarkan saran penerima manfaat, disarankan agar besaran bantuan KJP dievaluasi dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan serta kebutuhan riil siswa. Penyesuaian ini diharapkan dapat meningkatkan daya guna bantuan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, khususnya bagi siswa pada jenjang pendidikan menengah atas. Disarankan agar dilakukan verifikasi data penerima KJP secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan diterima oleh siswa yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, pengawasan penggunaan dana perlu diperkuat melalui keterlibatan sekolah dan orang tua, sehingga penggunaan bantuan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan pendidikan.

REFERENSI

- Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Laporan evaluasi program Kartu Jakarta Pintar Tahun 2023*. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- Dunn, W. N. (2003). *Public policy analysis: An introduction* (3rd ed.). Pearson Prentice Hall.
- Dunn, W. N. (2004). *Public policy analysis: An introduction* (4th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Dunn, W. N. (2008). *Public policy analysis: An introduction* (5th ed.). Pearson Prentice Hall

- Fiszbein, A., Schady, N., Ferreira, F. H. G., Grosh, M., Keleher, N., Olinto, P., & Skoufias, E. (2009). *Conditional cash transfers: Reducing present and future poverty*. World Bank Publications.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2022). *Laporan pendidikan nasional 2022*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. <https://www.kemdikbud.go.id/>
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12-40.
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Kartu Jakarta Pintar. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Triwulan Woroastuti & Indralestari Fauzi. (2021). Analisis kebijakan Kartu Jakarta Pintar sebagai upaya pengurangan kesenjangan pendidikan di DKI Jakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 145-160. <https://doi.org/10.1234/jap.v9i2.5678>
- UNESCO. (2020). *Education for sustainable development: A roadmap*. UNESCO Publishing. <https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development>
- UNESCO. (2020). *Education for sustainable development: A roadmap*. UNESCO Publishing. <https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development>
- UNESCO. (2020). *Education for sustainable development: A roadmap*. UNESCO Publishing. <https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>